

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM LABUAN CERMIN DI KECAMATAN BIDUK-BIDUK OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

Agus Neksan Neri¹ Fajar Apriani², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dan pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, serta faktor penghambat implementasi program pengembangan destinasi wisata. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Informan lainnya ialah Kepala Seksi Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Produk Wisata, Kepala Seksi Obyek Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Berau, Pokdarwis wisata di Labuan Cermin dan Pengunjung Objek Wisata Labuan Cermin. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin Di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sudah berjalan cukup baik namun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan status kawasan, keterbatasan aksesibilitas menuju obyek wisata, agen tour travel yang belum terkoordinir dengan baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemitraan diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Masyarakat sudah cukup aktif dalam pembangunan infrastruktur. Namun masih ada beberapa masyarakat yang masih kurang peduli dengan pembangunan yang terjadi di desa mereka.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Kata Kunci : Implementasi Program Pariwisata, Destinasi Wisata, Pengembangan Wisata, Wisata Alam

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh media massa di Indonesia adalah sejalan dengan program pemerintah dalam menjalankan pariwisata sebagai penambahan devisa negara di luar sektor nonmigas. Negara sudah merencanakan program pengembangan dan pembenahan pariwisata sejak tahun 1988 hingga sekarang, hal ini diharapkan dapat menarik kehadiran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang harapannya akan mendatangkan keuntungan bagi pemasukan keuangan negara. Selain itu pengeluaran belanja oleh para wisatawan diharapkan dapat meningkatkan pemasukan masyarakat setempat dan memperluas pengetahuan dan wawasan kebudayaan di bidang pariwisata sebagai bentuk kontak budaya wisatawan dengan wisatawan yang berada dari luar lingkungan budaya setempat.

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam penataan tata ruang wilayahnya, sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan sejumlah kebijakan, yaitu; meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan budaya, serta mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.

Prioritas pembangunan Kabupaten Berau yang diletakkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau 2012, menetapkan pengembangan pariwisata melalui perwujudan kawasan pariwisata yang dilakukan dengan:

1. Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata,
2. Pengembangan promosi pariwisata,
3. Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah,
4. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata,
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata,

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai Destinasi Wisata yang terkemuka di Dunia” pada Renstra Tahun 2016-2021.

Khusus terkait pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menetapkan misi antara lain:

1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab.

Di dalam implementasi program pengembangan pariwisata di Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-biduk, masih terdapat sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perawatan pada sarana pariwisata yang telah tersedia, contohnya kapal dayung yang dulunya tersedia untuk pengunjung akibat kurang dirawat akhirnya kini sudah tidak dapat digunakan lagi.
2. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana pariwisata, sebab tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang. Contohnya gazebo sebagai tempat beristirahat hanya tersedia dua buah, tempat pembuangan sampah juga hanya tersedia dua buah. Padahal jumlah pengunjung dapat mencapai 1.500 orang perbulan.
3. Berkurangnya wahana wisata unggulan, seperti beberapa binatang peliharaan dan tanaman-tanaman langka yang dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada.
4. Pengembangan daerah wisata tidak disertai dengan tersedianya pengelola obyek wisata yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan obyek wisata menjadi menarik dan unggul, sebab kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Labuan Cermin masih kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan bidang kepariwisataan, misalnya tentang pengembangan diri dalam melayani wisatawan.

Rangkaian persoalan di atas, merupakan sejumlah masalah yang berkenaan dengan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Sehingga penelitian ini berupa analisis mengenai implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau serta faktor pengahambatnya.

KERANGKA DASAR TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* suatu istilah dengan hasil keputusan yang dilakukan oleh pemegang otoritas, dan mengandung arti sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna mengatasi persoalan agar dapat terciptanya suatu keadaan yang lebih baik, Anderson (dalam Wahab, 2003:99-102). Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi permasalahan publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2007:147), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Menurut Frederick (dalam Islamy, 2001:37), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan-tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usaha kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pariwisata dan Objek Wisata

Fandeli (2001: 37) memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkait di bidang tersebut. Pariwisata menurut Gupa (dalam Yoeti, 2006:8) adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Spillane (2006: 29) menyatakan beberapa jenis pariwisata, yaitu: pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*), pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*), pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*) dan pariwisata untuk berkonveksi (*convention tourism*).

Pariwisata tentu sangat berhubungan dengan objek wisata, Suwantoro (2004: 6) menyatakan bahwa obyek wisata adalah sumberdaya alam yang berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan serta ditunjuk untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaannya. Sedangkan Fandeli (2001: 58) menyatakan bahwa obyek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah budaya bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Marpaung (2009:78) menerangkan bahwa objek wisata memiliki dua kategori wisata, yaitu objek wisata alam dan objek wisata sosial budaya.

Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti (2006:273), pengembangan pariwisata adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan obyek wisata yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dalam penelitian, yaitu implementasi program pengembangan pariwisata adalah pelaksanaan program yang disusun oleh Dinas Pariwisata untuk membuat potensi wisata alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi yang dilakukan secara bertahap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksud menggambarkan atau mendeskriptifkan fenomena yang berkenaan dengan tema sentral. Fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata yang terdiri dari peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dan pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, serta faktor penghambat implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata diantaranya komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, sedangkan *informannya* antara lain Kepala Seksi Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Produk Wisata, Kepala Seksi Obyek Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Berau, Pokdarwis wisata di Labuan Cermin dan Pengunjung Objek. Kemudian sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peraturan-peraturan, dokumen dan arsip lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field work research*), dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: observasi, wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Mathew. B Milles A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana (2014:33) yaitu analisis terdiri dari beberapa jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya: kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin

Dalam fungsi pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau memiliki program-program unggulan. Keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata ini dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya

manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kawasan wisata, dan pemanfaatan kawasan wisata.

1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tujuan program pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas dan intensitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi untuk mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan wisata berikutnya. Menurut Yoeti (2006:273), pengembangan pariwisata adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan obyek wisata yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.

Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan telah cukup baik dari yang sebelumnya dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kecamatan Biduk-Biduk. Namun dalam pembangunannya memang terhambat pada Aksesibilitas menuju objek wisata labuan cermin, Keterbatasan alokasi anggaran dan Status Kawasan. Selain pembangunan sarana dan prasarana wisata Labuan Cermin juga diperlukan tata kelola wisata yang baik termasuk peningkatan SDM pengelola dan pelaku wisata serta daya tarik/ atraksi wisata yang dikemas dalam paket wisata berkelanjutan.

2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pengembangan daerah tujuan pariwisata tentu merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan bidang pariwisata yang menjanjikan bagi daerah. Salah satu tolak ukur pada keberhasilan pengembangan destinasi wisata adalah bertambahnya jumlah kunjungan lokal maupun mancanegara. Menurut Cooper, Fletcher dan Wanhill (dalam Sunaryo, 2013:159) beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama diantaranya obyek atau daya tarik (*attractions*), aksesibilitas (*accessibility*), amenitas (*amenity*) dan fasilitas pendukung (*ancillary services*). objek wisata Labuan Cermin sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki keunggulan dibanding wisata lain dimana keindahan wisata alam dan air, wisata unik dan langka dengan danau dua rasa yakni tawar dan asin. sehingga perlunya memperatahkan hal tersebut, untuk mempertahankan wisata ini Dinas bekerja sama dengan Pokdarwis dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang, keunggulan SDM

Upaya yang demikian saat ini sudah sepenuhnya dilakukan dengan sebagaimana mestinya, meskipun dalam pelaksanaannya terhambat pada aksesibilitas, status kawasan, keterbatasan SDM dan alokasi anggaran. Pada taraf lanjutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan terus mengembangkan pengembangan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan karena objek wisata Labuan Cermin adalah kawasan lindung maka secara langsung pengembangan objek wisata ini wajib berwawasan lingkungan maka harus memiliki lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman.

3. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Pengembangan destinasi wisata juga perlu didukung dengan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dalam rangka melakukan promosi tujuan wisata. Sebab tanpa promosi, maka suatu obyek wisata tidak akan mampu meraih kunjungan wisata yang menjanjikan bagi pemasukan daerahnya. Keberhasilan pengembangan kawasan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transportasi dan kenyamanan bagi para investor maupun wisatawan dalam menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata.

Pengembangan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan dilandaskan atas usaha-usaha yang dikemukakan oleh Marpaung dan Bahar (2009:9), yaitu memelihara dan membina keindahan alam dan kekayaan serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan, menyediakan dan membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, *entertainment*, dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan termasuk pendidikan pegawai, menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam dan di luar negeri, mengusahakan kelancaran formalitas perjalanan dan lalu lintas para wisatawan dan dengan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya, mengerahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan kelancaran arus wisatawan.

Keberlangsungan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan yang saat ini telah di canangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mengalami beberapa seperti keberadaan tour travel belum terkoordinir dengan baik, banyaknya paket biro perjalanan wisata melalui luar daerah dan juga masih banyaknya tarif perjalanan yang ditawarkan oleh masing-masing tour travel yang bervariasi. Sehingga secara garis besar mengenai upaya pengembangan paket wisata unggulan yang telah dilakukan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dapat dikatakan belum maksimal terkait kendala yang telah disebutkan diatas, hal ini tentu menjadi persoalan serius yang harus dihadapi terutama sebagai sektor pelayanan terhadap kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau.

4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha

Program peningkatan sumberdaya pengelola pariwisata adalah salah satu program yang diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia di bidang wisata dengan tujuan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya pengelola objek-objek wisata secara profesional. Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor. Menurut Cleaves (dalam Wahab, 2003:125) bahwa implementasi mencakup “*a process of moving toward a policy objective by mean of administrative and political steps*”. keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat diketahui dari sudut kemampuan pelaku kebijakan secara nyata dalam meneruskan/mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara yang diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Perwujudan bentuk implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terkait pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Labuan Cermin, selama ini pemerintah Berau khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau menjalin kerjasama dengan pihak lain sebagai bentuk perencanaan ke depan untuk melakukan penambahan jumlah pihak lain yang digandeng pemerintah Berau dalam kerjasama di bidang pembangunan pariwisata di Labuan Cermin melalui koordinasi dan pembinaan yang melibatkan pihak BUMN/Swasta, Perbankan dan LSM. Koordinasi bersama mitra lain saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau demi tercapainya wisata Labuan Cermin yang baik. Namun dalam pelaksanaannya memang kurang mendapatkan respon yang baik hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait kemitraan yang dilakukan, masyarakat beranggapan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pihak Dinas masih ada pembagian-pembagian yang kurang tepat dalam pelaksanaan kerjasama ini. Sehingga sampai saat ini upaya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan

dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha khususnya masyarakat tempatan.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin

Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah faktor penghambat dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata alam Labuan Cermin antara lain:

1. Komunikasi

Masyarakat dan Pokdarwis memang belum mengetahui secara jelas tujuan dari program pengembangan destinasi wisata yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Berau dikarenakan mereka kurang memahami maksud dan tujuan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya di dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Kabupaten Berau memiliki pelaksana lapangan yang kurang memadai. Dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau bekerjasama dengan pihak lain. Dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau namun belum belum maksimal.

3. Struktur Birokrasi

Sumberdaya di dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Kabupaten Berau memiliki pelaksana lapangan yang kurang memadai dan masih memerlukan pembenahan yang berkelanjutan mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dan organisasi luar dan sebagainya.

4. Disposisi

Disposisi dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Labuan Cermin meliputi komitmen pelaksana yang sudah tinggi untuk melaksanakan programnya, tetapi karakteristik pelaksana yang menyesuaikan dengan kearifan lokal masih kurang menjamin adaptasi dan sosialisasi program terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga sebagian kegiatan masih belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat akibat hal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara umum implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sudah cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Secara khusus sesuai sub fokus penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sarana prasarana pariwisata telah dilakukan namun terhambat oleh aksesibilitas menuju obyek wisata Labuan Cermin, keterbatasan anggaran dan status kawasan.
 - b. Pengembangan daerah tujuan wisata telah dilaksanakan namun masih terhambat oleh permasalahan keterbatasan anggaran dan aksesibilitas menuju obyek wisata.
 - c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan masih kurang baik sebab terhambat pada agen *tour & travel* yang belum terkoordinir dengan baik, banyaknya biro paket perjalanan wisata melalui Tarakan dan tarif yang di tawarkan masing - masing *tour & travel* masih bervariasi.
 - d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga/dunia usaha telah dilakukan namun masih kurang mendapatkan respon yang baik dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemitraan yang dilakukan.
2. Faktor yang menjadi penghambat implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau antara lain aksesibilitas menuju obyek wisata Labuan Cermin, keterbatasan anggaran dan permasalahan status kawasan yang menjadikan upaya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan daerah tujuan wisata belum berhasil, koordinasi yang masih lemah antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan pengusaha *tour & travel* dalam hal pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha maupun pokdarwis terkait kemitraan yang dapat dilakukan bersama pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau untuk pembangunan obyek wisata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, harapan lain dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk saran-saran. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Berau perlu mengusulkan kepada Bupati Berau untuk menjadikan Labuan Cermin sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata sesuai dengan keunggulannya, agar pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dapat dilakukan dengan baik melalui dukungan ketersediaan anggaran, penyelesaian sengketa status kawasan dan sosialisasi program pemerintah tersebut kepada Pokdarwis dan masyarakat untuk dapat dukungan yang lebih baik.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau perlu mengkomunikasikan kepada para pengusaha *tour & travel* tentang standarisasi penetapan tarif paket wisata untuk mengatasi variasi tarif perjalanan wisata dalam rangka koordinasi promosi destinasi wisata yang lebih baik.
3. Dari sisi kualitas sumber daya manusia perlu diperlukan adanya pelatihan khusus dan memadai demi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tiap-tiap personil lapangan yang langsung bersentuhan dengan tata kelola dan pelaksanaan pariwisata Labuan Cermin, serta perlunya penambahan jumlah personil lapangan diharapkan dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai penunjang pengembangan kawasan wisata Labuan Cermin.
4. Perlunya meningkatkan komitmen bersama di segala sektor dalam mengatur tata kelola pembangunan wisata Labuan Cermin yang didukung dengan adanya kerjasama yang transparan dan terarah oleh seluruh penyelenggara serta pembuat kebijakan yang berorientasi menunjang seluruh komponen keberhasilan pembagunan pariwisata di Kabupaten Berau.

DAFTAR PUSTAKA

- Fandeli, Chafid. 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Liberty Offset, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung, Happy dan Herman Bahar. 2009. *Pengetahuan Kepariwisatan*. Alfabeta, Bandung.
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. Sage Publication Ltd, London.
- Nugroho, Riant. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*, Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau.
- RPJMD Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021.
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2011-2012.

- Spillane, James J. 2006. *Pariwisata dan Wisata Budaya*. CV Rajawali, Yogyakarta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Dari Formulasi Ke *Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____ . 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Cetakan kedua. PT Pradnya Paramita. Jakarta